

ABSTRAK

Nama : Dinda Ikhlimah Syahrani
Nim : 21107710006
Judul : Efektivitas Penegakan Hukum Penerbitan Sertipikat Tanah Secara Elektronik di Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar (Studi Kantor di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Blitar)
Pembimbing : Fitriyah Nurrahmah, S.HI., M.H
Weppy Susetyo, S.H., M.H
Kata Kunci : Sertifikat elektronik, efektif, penegakan hukum

Perkembangan teknologi pada Era 4.0 mendorong Pemerintah Indonesia untuk mengimplementasikan pelayanan publik berbasis teknologi dalam berbagai aspek administrasi pemerintahan, termasuk dalam bidang pertanahan. Hal ini tercermin dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penerbitan Dokumen Elektronik dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah. Peraturan tersebut mengatur proses pendaftaran sertipikat hak atas tanah secara daring (*online*) atau elektronik, di mana bukti hak atas tanah diterbitkan dalam bentuk dokumen digital yang disebut Sertipikat Elektronik. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 1. Bagaimana efektivitas penerbitan sertipikat tanah secara elektronik di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Blitar ?, 2. Bagaimana penegakan hukum penerbitan sertipikat tanah elektronik di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Blitar?.

Metode yang digunakan adalah yuridis empiris. Sampel dalam penelitian ini adalah masyarakat kecamatan sutojayan. Teknik pengumpulan data menggunakan kuersioner, observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa data yang diperoleh dari penilaian masyarakat serta para pemangku kepentingan seperti BPN dan PPAT, rata-rata tingkat efektivitas program ini mencapai 73,75%, yang berarti masuk dalam kategori efektif, selanjutnya Penegakan hukum yang efektif dalam penerbitan sertipikat tanah elektronik akan memberikan jaminan kepastian hukum kepada pemilik tanah serta mendukung upaya pemerintah dalam mewujudkan penerbitan sertipikat yang berbasis elektronik. Penerbitan sertipikat tanah secara elektronik tetap memerlukan pengawasan dan penegakan hukum yang ketat, sebab terdapat potensi pelanggaran administratif maupun pidana yang dapat muncul, seperti kesalahan input data, manipulasi sistem, pemalsuan dokumen digital, serta sengketa yang timbul akibat kekeliruan identitas objek atau subjek tanah.

ABSTRACT

Name : Dinda Ikhlimah Syahrani
NIM : 21107710006
Title : *Effectiveness of Law Enforcement in Electronic Land Certificate Issuance in Sutojayan District, Blitar Regency (Study at the National Land Agency Office, Blitar Regency)*
Academic : Fitriyah Nurrahmah, S.HI., M.H
Advisor : Weppy Susetyo, S.H., M.H
Keywords : *Electronic certificate, Effectiv, Legal Enforcement*

The advancement of technology in the Era 4.0 has encouraged the Government of Indonesia to implement technology-based public services in various aspects of government administration, including the land sector. This is reflected in the issuance of the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency (ATR/BPN) Number 3 of 2023 concerning the Issuance of Electronic Documents in Land Registration Activities. The regulation governs the process of registering land ownership certificates online or electronically, where proof of land rights is issued in the form of a digital document called an Electronic Certificate (Sertipikat-el). The research problems in this study are: 1) How effective is the issuance of electronic land certificates at the National Land Agency of Blitar Regency? 2) How is law enforcement carried out in the issuance of electronic land certificates at the National Land Agency of Blitar Regency?

This research uses an empirical juridical method. The sample in this study consists of the community in Sutojayan Sub-district. Data collection techniques include questionnaires, observation, interviews, and documentation.

The results show that based on assessments from the community and stakeholders such as BPN and PPAT, the average effectiveness level of the program reached 73.75%, which falls into the "effective" category. Furthermore, effective law enforcement in the issuance of electronic land certificates provides legal certainty guarantees for landowners and supports the government's efforts to implement a digital-based land certification system. However, the issuance of electronic land certificates still requires strict supervision and law enforcement due to the potential for both administrative and criminal violations, such as data entry errors, system manipulation, digital document forgery, and disputes arising from identity errors of land objects or subjects.